



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2017/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI
SUB UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Aswanto**
2. Jabatan : **HAKIM KONSTITUSI**
3. NHK : **405598**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/225 m2 di Makassar, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di Makassar, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/211 m2 di Makassar, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 825.000.000

1. MOBIL, Mercedes Benz Sedan Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
2. MOBIL, Daihatsu Terios Minibus Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOBIL, Honda CRV Jeep Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 850.044.370**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 6.675.044.370**III. HUTANG** Rp. 1.802.106.436**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.872.937.934

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **7 Juni 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.